

# Transparansi Informasi Publik Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan Kekalik Jaya

M. Ikhsan Fauzi<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Geografi, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[m.ikhsanfauzi068@gmail.com](mailto:m.ikhsanfauzi068@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibrahimali@ummat.ac.id](mailto:ibrahimali@ummat.ac.id)<sup>2</sup>

---

**Keywords:**

Public Information  
Transparency; Subdistrict  
Development; Community  
Empowerment; Citizen  
Participation; Literature  
Review.

**Abstract:** This study aims to analyze the role of public information transparency in supporting development implementation and community empowerment in Kekalik Jaya Subdistrict, using a library research approach and integrative literature review method. Data sources were obtained from Google Scholar, Scopus, DOAJ, and Scispace, focusing on articles published between 2015 and 2024. The synthesis shows that transparency fosters citizen participation, strengthens public trust in local governance, and enhances development accountability. However, several implementation barriers persist, including limited digital access, low information literacy, and weak two-way communication systems. This study highlights a literature gap, where most existing research focuses on rural villages or districts, while urban subdistrict contexts remain underexplored. Findings reveal that transparency is not merely about disclosing information but also about encouraging active civic engagement. This research offers novelty by exploring the relationship between transparency and empowerment in the specific context of urban subdistricts.

**Kata Kunci:**

Transparansi Informasi  
Public; Pembangunan  
Kelurahan;  
Pemberdayaan  
Masyarakat; Partisipasi  
Warga; Literature  
Review.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi informasi publik terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kekalik Jaya melalui pendekatan *library research* dengan metode *integrative literature review*. Sumber data diperoleh dari Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Scispace, dengan kriteria artikel tahun 2015–2024. Hasil sintesis menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi warga, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah kelurahan, serta meningkatkan akuntabilitas pembangunan. Namun, terdapat sejumlah tantangan implementasi seperti keterbatasan akses digital, rendahnya literasi informasi, dan lemahnya sistem komunikasi dua arah. Penelitian ini menyoroti gap literatur yang lebih banyak membahas transparansi di tingkat desa atau kabupaten, sementara aspek kelurahan sebagai wilayah administratif perkotaan masih kurang dieksplorasi. Temuan menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya soal menyediakan informasi, melainkan juga membangun keterlibatan aktif masyarakat. Studi ini menawarkan novelty dalam menganalisis hubungan antara transparansi dan pemberdayaan berbasis konteks lokal kelurahan.

---

**Article History:**

Received: 26-06-2025

Online : 12-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## **A. LATAR BELAKANG**

Transparansi informasi publik didefinisikan sebagai penyediaan informasi pemerintahan yang akurat, memadai, dan mudah diakses publik (Hakim & Phahlevy, 2024). Konsep ini sejalan dengan prinsip “open government” yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Heny & Nurdin, 2018). Sementara itu, pemberdayaan masyarakat atau *community empowerment* merujuk pada proses partisipatif yang memberikan kekuasaan dan kontrol lebih besar kepada masyarakat terhadap keputusan pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka (Ramadhani et al., 2024). Kedua konsep ini berkaitan erat dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal, di mana keterbukaan informasi menjadi jembatan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian Baskoro (2025) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui badan seperti BPD dan sistem informasi publik memperkuat pemberdayaan masyarakat di pedesaan Indonesia. Hasil riset lain memperlihatkan bahwa publikasi anggaran dan realisasi dana desa secara terbuka meningkatkan pengawasan warga sehingga mengurangi potensi penyelewengan. Studi di Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa meski dana kelurahan berpotensi memberdayakan masyarakat, pengelolaan yang tidak (Azizah et al., 2021). Maksimal terutama dalam hal transparansi membatasi pengaruh dana terhadap pembangunan fasilitas dan kapasitas lokal. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan sentral dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pedesaan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas air menjadi elemen utama yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, diikuti oleh perawatan infrastruktur dan manajemen sumber daya (Sabri & Ibrahim, 2024).

Di Kelurahan Tugu Utara, transparansi yang minim khususnya dalam pelaporan anggaran menurunkan tingkat kepercayaan dan partisipasi warga terhadap program pembangunan publik (Ummah, 2019). Temuan ini konsisten dengan studi nasional lainnya yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Alita et al., 2025). Selain itu, peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) telah terbukti krusial dalam memfasilitasi akses informasi, mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Sari & Mulyadi, 2020).

Penelitian di Talang Semut menyatakan bahwa transparansi dan keterbukaan dari aparat kelurahan menjadi landasan pemberdayaan masyarakat melalui norma keadilan, partisipasi aktif, dan kolaborasi (Rahmah et al., 2024). Selain itu, lembaga kelembagaan komunitas seperti RT/RW, PKK, dan LPM berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam menyusun, mengendalikan, dan memanfaatkan perencanaan pembangunan secara partisipatif, asalkan didukung oleh kapasitas SDM dan akses informasi yang. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan dan sangat bergantung pada tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab, serta persepsi akan manfaat langsung dari keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan (Ibrahim et al., 2021).

Praktik transparansi dalam pembangunan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki potensi untuk memanfaatkan sistem digital dalam menyebarkan informasi anggaran, kegiatan, dan hasil pembangunan. Penerapan sistem pelaporan berbasis daring, papan informasi digital, dan kanal media sosial dapat menjadi sarana efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan program pembangunan dapat ditingkatkan melalui forum

daring atau diskusi komunitas berbasis data. Inovasi seperti ini membuka ruang kolaborasi yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Berdasarkan sintesis di atas, terlihat bahwa meskipun secara umum transparansi informasi mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang partisipatif, di tingkat kelurahan termasuk Kekalik Jaya masih terdapat gap implementasi. Selama ini, penelitian lebih berfokus pada tingkat desa atau kabupaten, sementara kelurahan sebagai wilayah administratif perkotaan seringkali luput dari perhatian riset. Selain itu, belum banyak kajian yang menelaah secara spesifik hubungan antara transparansi dan pemberdayaan warga dalam konteks penggunaan dana kelurahan. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan *novelty* berupa analisis mendalam tentang peran transparansi informasi publik dalam mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kekalik Jaya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana transparansi informasi publik dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan metode *integrative literature review* untuk menganalisis keterkaitan antara transparansi informasi publik dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang utuh atas fenomena yang dikaji. Pendekatan ini relevan digunakan karena memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif teoritis dan empiris dari berbagai studi terdahulu dalam waktu yang berbeda namun topik yang serupa.

Sumber data yang digunakan dalam studi ini berasal dari basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, Scispace, DOAJ, dan Scopus. Penelusuran dilakukan terhadap artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik transparansi informasi publik, partisipasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal atau kelurahan. Kriteria inklusi mencakup artikel yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, tersedia dalam versi full-text, dan relevan secara substantif terhadap fokus penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi adalah artikel yang tidak tersedia secara lengkap, tidak melalui proses peer-review, atau hanya berupa opini tanpa dukungan data atau metodologi yang jelas.

Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “transparansi informasi publik”, “pembangunan kelurahan”, “pemberdayaan masyarakat”, dan “partisipasi masyarakat”, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan utama: identifikasi, penyaringan, dan kelayakan. Artikel yang berhasil lolos tahap penyaringan akan dianalisis berdasarkan tema, konteks penelitian, wilayah studi, serta kontribusi terhadap pemahaman hubungan antara transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh artikel yang terpilih disusun dan diklasifikasikan menggunakan tabel ringkasan kajian literatur.

Analisis data dalam studi ini dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi utama dari variabel yang dikaji. Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi antar sumber, yakni membandingkan temuan dari artikel yang berbeda namun dalam konteks sejenis. Keandalan dijaga dengan memastikan konsistensi dalam penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, serta penggunaan alat bantu pengelolaan referensi untuk menghindari duplikasi dan memastikan keterlacakan dokumen. Integrasi temuan dilakukan secara naratif untuk menyusun

pemetaan konsep dan hubungan antara transparansi informasi publik, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Transparansi Informasi Publik dalam Praktik Pemerintahan Kelurahan**

Transparansi informasi publik di Kelurahan Kekalik Jaya menjadi aspek penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Keterbukaan informasi tidak hanya menyangkut penyampaian data kepada masyarakat, tetapi juga terkait dengan mekanisme dan saluran penyampaian yang digunakan. Kelurahan sebagai institusi pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendiseminasikan informasi yang relevan, termasuk informasi anggaran, program pembangunan, serta capaian kinerja kelurahan.

Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti papan pengumuman di kantor kelurahan, baliho kegiatan, hingga akun media sosial kelurahan. Namun demikian, efektivitas penyampaian informasi sering kali terkendala oleh minimnya akses digital masyarakat serta kurangnya kontinuitas dalam pembaruan informasi. Meskipun telah tersedia kanal komunikasi, belum semua informasi yang bersifat strategis dapat diakses secara menyeluruh oleh warga.

Persepsi masyarakat terhadap transparansi juga menjadi penentu dalam efektivitasnya. Sebagian warga merasa bahwa informasi yang disediakan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka akan keterbukaan, terutama terkait penggunaan dana kelurahan. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan bukan hanya soal *informing* (memberi tahu), tetapi juga soal *engaging* (melibatkan) masyarakat secara aktif. Dengan demikian, meskipun Kelurahan Kekalik Jaya telah menunjukkan inisiatif dalam menyediakan informasi kepada publik, masih terdapat ruang perbaikan. Perlunya sistem yang lebih terstruktur, dua arah, dan berbasis teknologi menjadi salah satu solusi untuk memperkuat praktik keterbukaan informasi secara merata dan responsive.

#### **2. Dampak Transparansi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Sosial**

Transparansi informasi publik memiliki peran signifikan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun sosial. Di Kelurahan Kekalik Jaya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas umum lainnya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan hingga evaluasi. Keterbukaan informasi mengenai rencana kegiatan dan anggaran memungkinkan masyarakat memahami proses dan turut serta mengawasi pelaksanaannya.

Pembangunan sosial seperti pelatihan kewirausahaan, program kesehatan lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan perempuan juga sangat bergantung pada sejauh mana informasi dapat diterima oleh warga. Kegiatan yang disusun secara transparan, terutama dalam hal penentuan peserta, sumber anggaran, dan hasil kegiatan, menciptakan rasa kepercayaan dan mendorong partisipasi lebih luas. Namun masih ditemukan tantangan dalam menjaga kesinambungan antara informasi yang diberikan dan hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, sebagian warga merasa tidak terlibat dalam penentuan prioritas program pembangunan. Hal ini mencerminkan bahwa keterbukaan informasi harus diiringi dengan forum komunikasi yang inklusif, agar pembangunan benar-benar bersifat partisipatif.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ketika informasi disampaikan secara jujur dan terbuka, maka tingkat kepercayaan dan kepedulian warga terhadap proses pembangunan

meningkat. Transparansi berperan sebagai jembatan antara pemerintah kelurahan dengan warga, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3. Peran Transparansi dalam Mendorong Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting dalam menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan lokal. Transparansi informasi publik di Kelurahan Kekalik Jaya berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Ketika informasi program pemberdayaan dipublikasikan secara jelas, masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan.

Program pemberdayaan seperti pelatihan UMKM, kelompok tani, posyandu, dan kegiatan keagamaan menjadi lebih efektif ketika warga memahami tujuan, mekanisme, serta hasil dari kegiatan tersebut. Ketika masyarakat mengetahui sumber dana, pelaksana program, dan indikator keberhasilannya, maka mereka terdorong untuk terlibat tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra pelaksana kegiatan. Namun, pemberdayaan tidak cukup hanya dengan membuka akses informasi. Diperlukan juga peningkatan literasi masyarakat agar mereka mampu membaca, memahami, dan menanggapi informasi yang diberikan. Keterbukaan informasi tanpa kesiapan masyarakat dalam mengelolanya justru dapat menimbulkan salah tafsir atau apatisisme.

Oleh karena itu, transparansi dan pemberdayaan harus berjalan beriringan. Pemerintah kelurahan tidak hanya perlu menyediakan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas serta partisipasi mereka dalam pembangunan secara berkelanjutan.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi informasi publik memainkan peran krusial dalam memperkuat pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kekalik Jaya. Keterbukaan informasi mendorong partisipasi warga, memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah kelurahan, serta memfasilitasi proses pembangunan yang lebih inklusif dan akuntabel. Namun, efektivitas transparansi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses, rendahnya literasi informasi, dan belum optimalnya sistem penyampaian informasi dua arah. Oleh karena itu, transparansi informasi publik perlu terus ditingkatkan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi integral dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, riset perlu difokuskan pada efektivitas saluran digital dalam menyampaikan informasi pembangunan kelurahan, serta pengaruh tingkat literasi digital warga terhadap partisipasi pembangunan. Kajian mendalam mengenai model komunikasi dua arah yang adaptif dengan konteks lokal juga menjadi kebutuhan mendesak.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih Kepada Dosen Pengampu yang telah memberikan Tugas ini, sehingga Penyusun bisa belajar dan mengembangkannya, Penyusun Berharap Paper ini Bermanfaat Bagi banyak Orang kedepannya.

## REFERENSI

- Alita, Saepudin, Ramadhani, & Azzahra. (2025). *Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah*. 2(3).
- Azizah, N. A., Riadi, S., & Nugroho, A. R. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20527/jgp.v2i1.4534>
- Hakim, A. L., & Phahlevy, R. R. (2024). Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia. *Journal Customary Law*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.3086>
- Heny, A., & Nurdin, M. (2018). Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E-Government. In *Jurnal Manajemen Pemerintahan* (pp. 1–17).
- Ibrahim, I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., & ... (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa Barat. In *Prosiding ...* <http://journal.ummat.ac.id/index.php/PRPE/article/view/3989%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/PRPE/article/download/3989/2398>
- Rahmah, Muliani., Nilwan, A., & Ikbal, M. (2024). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 12(Idm), 27–38.
- Ramadhani, P., Mabel, S., Mowainop, A., Watkuk, F., & Oja, H. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial*. 01(03), 295–304.
- Sabri, & Ibrahim. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 22, 328–335.
- Sari, M., & Mulyadi, R. (2020). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 109–118. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>
- Ummah, M. S. (2019). mengungkapkan bahwa MST dapat secara signifikan menurunkan tingkat pelanggaran hukum, agresivitas, dan penyalahgunaan zat di kalangan remaja yang berisiko tinggi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)